



RENCANA KERJA TA. 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

JL. KH. WACHID HASYIM NO 17 GRESIK TELP. (031) 3973432



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ke-2 pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, dan menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN RB

Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, diharapkan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan serta bahan evaluasi pelaksanaannya. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik senantiasa diharapkan dari semua pihak, dalam rangka perbaikan kearah perencanaan yang semakin baik. Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen Renja ini, disampaikan terimakasih.

Gresik, Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 198809 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Peraturan Kepala Dinas.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaks.Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
3.3 Program dan Kegiatan.....	41
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja.....	45
4.2 Pendanaan.....	45
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025.....	45
 BAB V PENUTUP	85

Daftar Tabel :

- Tabel 2.1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra s.d. Tahun 2025.....	10
- Tabel 2.2 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
- Tabel 2.3 (T-C.31)	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ..	28
- Tabel 2.4 (T-C.32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	34
- Tabel 2.7 (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	42
- Tabel 2.8	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dispendukcapil	48



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. KH Wakhid Hasyim No. 17 Tlp. (031) 3973432 Fax. (031) 3973433
Website : <http://dispendukcapil.gresikkab.go.id> e-mail : dispenduk@gresikkab.go.id
G R E S I K 61114

PERATURAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor : 906/1622/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Peraturan Menteri PAN RB Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DISPENDUKCAPIL TAHUN LALU

BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 digunakan sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : Oktober 2025



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 198809 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dalam rangka merealisasikan sasaran RPJMD sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal Renja yang mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan RKPD tahun 2025-2029 untuk perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
- Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan;
- Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan menurut Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonmenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan;

- Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keadaan sampai dengan triwulan III tahun 2025.

Penyusunan Renja tahun 2026 ini dilaksanakan setelah penyusunan Renstra OPD dan RKPD serta RPJMD karena pada prinsipnya rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Selanjutnya setelah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disahkan, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Renja merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai ruang lingkup OPD dalam hal ini adalah lingkup Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dokumen Renja tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja ini harus mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang menjadi target pada Renja OPD Provinsi Jawa Timur maupun pada Renja K/L terkait, sehingga diperlukan adanya oleh karenanya harus ada sinkronisasi dan keselarasan;
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada penyusunan RAPBD TA 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Nomor : 906/1622/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan

(Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Jenis bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai dokumen tindak lanjut dari RKPD tahun 2026 dalam lingkup OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam

perencanaan tahunan yaitu tahun 2026 yang sifatnya lebih operasional; dan

3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kerja dalam 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian RenstraDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

4.2. Pendanaan

BAB V : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, keadaan tahun 2024 tingkat capaian Sasaran berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : "*Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil*" tingkat capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) indikator adalah sebesar 100,165%
2. Sasaran 2 : "*Terwujudnya pelayanan prima*" tingkat capaian kinerja rata-rata dari 2 (dua) indikator adalah sebesar 100,34%
3. Sasaran3: "*Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan*" tingkat capaian kinerja adalah sebesar 113,76%

Berdasarkan data capaian tersebut terlihat bahwa tahun 2024 semua sasaran Renstra telah dapat direalisasikan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya dukung seluruh program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja rerata sebesar 99,01%, realisasi anggaran sebesar 89,89%

2. Program Pendaftaran Penduduk, capaian kinerja rerata sebesar 157,50%, realisasi anggaran sebesar 96,41%
3. Program Pencatatan Sipil, capaian kinerja rerata sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar 78,87%
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, capaian kinerja rerata sebesar 77,37%, realisasi anggaran sebesar 72,52%
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, capaian kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar 92,66%

Seluruh kinerja program tahun 2024 tersebut dapat direalisasikan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam setiap program dapat dilaksanakan dengan optimal. Disisi lain capaian kinerja tahun 2024 tersebut tidak lepas dari adanya komitmen seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan.

Dilihat dari sisi kinerja anggaran, tahun 2024 total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 11.531.752.187,00 dan realisasi sebesar Rp.10.317.545.347,64 atau capaian kinerja sebesar 89,47%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan seluruh kegiatan, maka faktor efektifitas dan efisiensi telah diterapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan telah dapat direalisasikan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Renja tahun 2024 serta pencapaian target kinerja Renstra dan Renja tahun 2024 menjadi

dasar menentukan target kinerja program dan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2025 sebagai tindak lanjut dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2021-2026. Terkait dengan pelaksanaan renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dan 2024 serta target kinerja renja tahun 2025 dan target Renstra sebagaimana *Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025*.

Evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta evaluasi atas realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah mencakup kendala/ permasalahan yang dihadapi.

TABEL 2. 1 (T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2025
KABUPATEN GRESIK

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	K o d e	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)		Ket.
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
		URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
	2.12.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100	
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	7 dokumen	7 dokumen	100	
2	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	
3	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan OPD	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	100	
4	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 org / bln	31 org / bln	38 org / bln	38 org / bln	100	40 org / bln	40 org / bln	100	
5	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100	13 laporan	13 laporan	100	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai	580 orang	50 orang	580 orang	356 orang	8,62	356 orang	356 orang	61,38	
6	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	580 orang	50 orang	580 orang	356 orang	8,62	580 orang	580 orang	100	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya daya dukung sarana kantor dan rapat kordinasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
7	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 paket	11 paket	8 paket	8 paket	100	9 paket	9 paket	100	
8	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100	
9	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)		Ket.
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
10	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-	
11	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	
12	2.12.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen		
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya daya dukung peralatan kantor	17 unit	17 unit	12 unit	12 unit	100	1 unit	1 unit	100	
13	2.12.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100	
14	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	12 unit	12 unit	100	-	-	-	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
13	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	
14	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	
15	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100	23 unit	23 unit	100	
16	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100	
17	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	12 unit	12 unit	100	12 unit	12 unit	100	
18	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-EI	99,1	99,74	99,37	99,37	100,65	99,38	99,38	100	
			Persentase kepemilikan KIA	79,19	87,77	64,16	64,16	85,58	64,43	64,43	100	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya dokumen pencatatan, penatausahaan dan pendaftaran penduduk terkini	175.600	317.463	185.450	185.450	180,79	195.460	195.460	100,00	

No.	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)		Ket.
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
19	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	600 dokumen	489 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	65,8	460dokumen	460dokumen	100	
20	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	175.000 dokumen	316.974 dokumen	175.000 dokumen	175.000 dokumen	180,32	195.000 dokumen	195.000 dokumen	100	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	96,81	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	92,37	100	100	100	100	100	100	100	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Tercapainya pelayanan prima dan daya dukung dokumen administrasi kependudukan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
21	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	39.590 dokumen	51.701 dokumen	39.590 dokumen	39.590 dokumen	137,24	41.600 dokumen	41.600 dokumen	100	
22	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	180,00	5 layanan	5 layanan	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan	410 instansi/ desa/kel	427 instansi/ desa/kel	420	420	104,15	423	423	100	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			11	11		12	12	100	
			Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terpenuhinya data kependudukan terkini	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
23	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	410 dokumen	427 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	287,5	12 dokumen	12 dokumen	100	
25	2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	122,5	2 laporan	2 laporan	100	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya daya dukung fungsi informasi kependudukan sesuai perkembangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
26	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100	

No.	K o d e	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran s/d Th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Th. 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Th.2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)		Ket.
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8/7x100)	10	11	12= (11/5x100)	13
27	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggung jawabkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya pengelolaan informasi kependudukan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100	
28	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100	
29	2.12.04.2.04.03	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase validasi Data Ganda, Anomali, dan Non Aktif	66,91	75,82	80,29	80,29	113,32	93,68	93,68	100	
		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya dokumen data kependudukan sesuai perkembangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	
30	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	25.000 dokumen	39.553 dokumen	15.000 dokumen	15.000 dokumen	181,75	15.000 dokumen	15.000 dokumen	100	
31	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan (sesuai target indikator sasaran) dan dampak yang ditimbulkan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan.

Penyusunan data hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2025, digunakan indikator kinerja Sasaran dan Program sebagaimana dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029. Kinerja pelayanan meliputi 5 (lima) sasaran dengan indikator masing-masing sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemenuhan Hak sipil, dengan indikator:
 - Pertumbuhan Kepemilikan KIA
2. Meningkatkan Manajemen Pelayanan, dengan indikator:
 - Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima, dengan indikator:
 - a. Persentase kepemilikan e-KTP
 - b. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator:
 - a. Persentase Kepemilikan e-KTP untuk keluarga miskin
 - b. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk keluarga miskin
5. Memperluas Kesempatan Kerja, dengan indikator:
 - Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan administrasi kependudukan

Pada Renstra periode sebelumnya tahun 2021-2026, hasil capaian kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana *Tabel 2.2 a (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik.*

Berdasarkan Tabel 2.2 a (T-C.30) terlihat bahwa seluruh indikator sasaran dapat dicapai dengan baik. Rata-rata capaian atas indikator sasaran kinerja pelayanan sesuai Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian Persentase kepemilikan KTP-el sebesar 99,85%
2. Rata-rata capaian Persentase kepemilikan Akta kelahiran sebesar 103,69%
3. Rata-rata capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 103,11%
4. Rata-rata capaian Tingkat kematangan layanan kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 96,00%
5. Rata-rata capaian Persentase penurunan sisa data ganda, anomali dan non aktif sebesar 95,87%

Dari kelima indikator sasaran kinerja diatas terlihat bahwa ada dua indikator (Persentase kepemilikan Akta kelahiran dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) rata-rata capaiannya melampaui 100% artinya dapat mencapai target yang ditetapkan, sedangkan tiga indikator lainnya (Persentase kepemilikan KTP-el , Tingkat kematangan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan Persentase penurunan sisa data ganda, anomali dan non aktif) rata-rata capaiannya mendekati 100%.

Sedangkan hasil capaian kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Gresik sesuai Renstra periode tahun 2025-2029 adalah sebagaimana *Tabel 2.2 b (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Sesuai Renstra 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik.*

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2025 ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP-el, Akta Pencatatan Sipil, KIA, NIK, KTP Elektronik dan data kependudukan kepada lembaga pengguna, penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gresik

Indikator sasaran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el, target 100%
 - b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th, target 97%
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), target 40%
 - d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra, target 3 mitra
 - e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data, target 410 Desa/Kel/RS/OPD
 - f. Buku Pokok Pemakaman (BPP), target 50% Desa/Kel
 - g. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital), target 25% dari total perekaman
 - h. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan
 - i. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021
 - j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan
2. Capaian keluaran/output kinerja pelayanan dokumen lainnya

- Keluaran/output hasil pelayanan dokumen lainnya, targetnya adalah laporan secara lengkap hasil pelayanan Dukcapil per-jenis dokumen sesuai data agregat.
3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan indikator:
 - a. Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan dokumen kependudukan
 - b. Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi
 - c. Target kinerja tiap semester 1 sesuai dengan jenis dan jumlah inovasi
 4. Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah, dengan indikator:
 - Melaksanakan Pelaporan BMN Dukcapil di Kabupaten Gresik, target kinerja: sudah dilaksanakan, meliputi ketersediaan blanko KTP-el dan Aset BMN (peralatan KTP-el)
 5. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kemendagri, dengan indikator:
 - Penyusunan data kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan Kemendagri, dengan target kinerja adalah tersusunnya profil data kependudukan berskala kabupaten.
 6. Pelayanan di Kecamatan, Desa/Kel untuk membantu penyelenggaraan sebagian irisan administrasi kependudukan, dengan indikator:
 - Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Kecamatan, Desa/Kel, target kinerjanya adalah terselenggaranya sebagian pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan, Desa/Kel.

7. Penerapan Zona Integritas (ZI), dengan indikator:

- Dilakukan penancangan Zona Integritas (ZI), dengan target kinerja adalah terbangunnya Zona Integritas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Gresik.

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2023 tersebut secara umum telah terakomodasi didalam Renstra OPD meliputi sasaran, program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja program, kegiatan yang dilakukan akan mendukung pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dimaksud.

TABEL 2.2 a (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI RENSTRA TAHUN 2021-2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Tahun						Rata-rata Capaian
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	Target	98,60%	98,80%	98,90%	99,18%	99,61%	
			Realisasi	98,19%	98,88%	99,17%	99,60%	98,51%	
			Capaian	99,58%	100,08%	100,27%	100,42%	98,90%	
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak 0-18 th	Target	90,90%	91,50%	92,00%	99,20%	99,32%	
			Realisasi	92,76%	98,21%	99,10%	99,31%	100,56%	
			Capaian	102,05%	107,33%	107,72%	100,11%	101,25%	
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	Target	83	83,5	84,00	89,99	90,61	
			Realisasi	86,48	86,5	89,98	90,60	90,60	
			Capaian	104,19%	103,59%	107,12%	100,68%	99,99%	
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Target	4	4	4	4	5	
			Realisasi	4	4	4	4	4	
			Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	Target	77,70%	55,39%	33,09%	19,71%	6,32%	
			Realisasi	77,70%	59,46%	24,18%	17,00%	7,12%	
			Capaian	100,00%	107,35%	73,07%	86,25%	112,66%	

INDIKATOR PROGRAM RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GRESIK

No.	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Formulasi Penghitungan	Base line (2020)	Target Renstra PD						Realisasi Capaian					
	1	2	3	4	5				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2	12	0	0		Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil														
	2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
						Persentase perekaman KTP-el	Jml pddk sdh rekam x 100%	98,43	98,66	98,89	99,10	99,31	99,51	99,70	98,24	99,47	99,74	99,99	98,88	
						Persentase kepemilikan KIA	Jml anak miliki KIA x 100%	54,51	65,31	72,37	79,19	89,96	91,05	92,68	72,97	79,74	67,77	75,49	78,62	
	2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
						Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	Jml anak kelahiran thn a yg miliki Akta kelahiran x 100%	93,58	94,44	95,65	96,81	97,92	98,00	98,00	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	
						Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	Jml kematian pddk thn a yg miliki Akta kematian x 100%	89,12	90,21	91,29	92,37	93,45	94,54	95,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
						Kebermanfaatan data kependudukan	Jml Instansi/Lbg yg bekerja sama pemanfaatan data / pelayanan	28 instansi	34 instansi	37 instansi	410 instansi	415 instansi	420 instansi	425 instansi	36	94	427	437	437	
						Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	Jml Layanan berstandarisasi ISO x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
						Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	Jml data tervalidasi x 100%	100,00	22,30	44,61	66,91	80,29	93,68	98,00	22,30	40,54	75,82	83,00	91,09	
	2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
						Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Sasaran program yg tercapai x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

TABEL 2.2 b (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI RENSTRA TAHUN 2026-2029
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	BASELINE 2024	Target						Proyeksi Capaian					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan Pemenuhan Hak Sipil	Pertumbuhan Kepemilikan KIA	v	v	v	0,08	0,024	0,026	0,028	0,03	0,033	0,035	0,024					
2	Meningkatkan Manajemen Pelayanan	Persentase Pemutakhiran Data dan Dokumen Kependudukan	v	v	v	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	84,00					
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Prima	Persentase Kepemilikan e-KTP	v	v	v	99,53	99,56	99,58	99,60	99,61	99,62	99,63	99,56					
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	v	v	v	61,04	65,00	68,00	70,00	71,00	72,00	73,00	65,00					
		Indeks Kepuasan Masyarakat	v	v	v	90,60	90,61	90,62	90,63	90,64	90,65	90,66	90,61					
4	Meningkatkan Kapabilitas Keluarga Miskin Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin	v	v	v	88,00	88,33	88,70	90,39	92,65	94,93	97,24	88,33					
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin	v	v	v	88,65	88,67	88,70	88,72	88,75	88,77	88,78	88,67					
5	Memperluas Kesempatan Kerja	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk	v	v	v	100	100	100	100	100	100	100	100					

INDIKATOR PROGRAM RENSTRA TAHUN 2025-2029
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

NO	KODE REKENING	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BASELINE 2024	Target						Proyeksi Capaian					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya ketercapaian sasaran program OPD	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100	100	100	100	100	100	100	100					
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75,49	75	76	77	78	78	80	75					
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9	10	11	12	13	14	15	10					
				Persentase Perekaman KTP-el	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase kepemilikan KK Pekerja migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase kepemilikan KTP Pekerja migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Kepemilikan KIA Anak Pekerja Migran bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Perekaman KTP-el Keluarga Miskin bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Akta Perkawinan yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase Penerbitan Akta Kelahiran keluarga miskin bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO	100	100	100	100	100	100	100	100					
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100	100	100					
				Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode	20	20	18	16	12	9	5	20					

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target pencapaian kinerja pelayanan sampai dengan Tahun 2025, adalah karena semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan, antara lain :

- Menambah sarana prasarana khususnya peralatan layanan di beberapa kecamatan ;
- Dilaksanakannya pelayanan di tempat strategis, seperti Mall, Desa/ Kelurahan;
- Meningkatkan kerjasama dengan beberapa puskesmas dan RS untuk pengurusan dokumen Adminduk, berupa Akta Kelahiran untuk bayi baru lahir;
- Semakin meningkatnya pelayanan melalui media sosial;
- Penekanan tugas yang dilakukan oleh Pimpinan secara rutin, untuk meningkatkan capaian kinerja dan menyelesaikan target-target yang belum tuntas;
- Adanya peningkatan kualitas SDM pelayanan;
- Sosialisasi langsung kepada warga maupun lewat media cetak dan media sosial;
- Tersedianya informasi lewat media sosial (Website, dan sejenisnya);
- Adanya komitmen seluruh jajaran dinas untuk meningkatkan kualitas layanan;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik sebagaimana pada analisis kinerja pelayanan telah dapat mencapai target kinerja yang direncanakan. Tingkat kinerja pelayanan diarahkan pada sasaran, meliputi:

1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Terwujudnya pelayanan prima
3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sampai dengan tahun 2024 kinerja sasaran telah dapat direalisasikan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan dokumen kependudukan di masyarakat, karena ada beberapa Instansi yang menerima surat keterangan saja.
2. Kualitas database kependudukan belum maksimal, dikarenakan data yang diterima berupa Data Agregat.
3. Jangkauan pelayanan administrasi kependudukan belum merata.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, menunjukkan adanya 3 faktor permasalahan, yaitu:

1. Belum terpenuhinya cakupan kepemilikan KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian
2. Validitas database kependudukan belum sepenuhnya tercapai
3. Mobilitas pelayanan langsung belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena keterbatasan anggaran.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan selalu dilakukan berbagai

penguatan untuk dapat meminimalkan dampak permasalahan tersebut.

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan terhadap Capaian Program Nasional

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik esensinya adalah dalam kerangka menyelesaikan berbagai permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan. Hal tersebut dilakukan agar daya dukung terhadap visi dan misi Bupati dan sekaligus terhadap capaian Program Nasional khususnya sektor administrasi kependudukan dapat dicapai.

Program Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik adalah:

1. Gresik AKAS, dalam hal ini adalah memperkuat dan mempercepat pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Gresik SEHATI, menunjuk pada Lahir bawa pulang akta.

Dari sisi program nasional, maka arah kebijakan terkait dengan urusan kependudukan adalah strategi nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tatakelola kependudukan, yang dilakukan melalui:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan
3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang merupakan tantangan yang harus diselesaikan, maka peluang pengembangan pelayanan yang dilakukan adalah:

1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk maupun WNI di luar negeri, meliputi:
 - Pelaksanaan layanan ke tingkat Desa/ Kelurahan
 - Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara mudah dan cepat
 - Peningkatan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan, meliputi:
 - Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi.
 - Pengembangan sistem untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri dalam hal melaporkan peristiwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selama ini telah difasilitasi oleh Kedutaan Besar yang ada di masing masing Negara.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan dimasa datang bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

akan dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Mencermati Renstra OPD tahun 2025-2029, maka disusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026.

Melalui pembahasan intern, secara umum antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dinas yang disusun KPA/PPTK terdapat beberapa perbedaan disisi alokasi anggaran. Sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan tidak ada perbedaan dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan dinas yang disusun bersama KPA/PPTK, dapat dilihat sebagaimana *Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 (Tabel T-C.31)*.

TABEL 2.3 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN GRESIK
NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				13.224.384.021	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				13.224.384.021	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 persen	12.633.577.421	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 persen	12.633.577.421	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	33.493.600	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	33.493.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	27.052.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	27.052.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	6.440.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	6.440.800	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 dokumen	6.546.798.914	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 dokumen	6.546.798.914	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	62 org/bln	6.540.998.914	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	62 org/bln	6.540.998.914	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	13 laporan	5.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	13 laporan	5.800.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	248.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	248.550.000	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Orang yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	580 orang	248.550.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Orang yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	580 orang	248.550.000,00	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.135.861.907	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.135.861.907	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	9 paket	2.007.202.287	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	9 paket	2.007.202.287	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	38.778.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	38.778.400	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	1 paket	39.875.047	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	1 paket	39.875.047	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyelenggaraan rpt koord. Dan konsultasi SKPD	12 laporan	287.638.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyelenggaraan rpt koord. Dan konsultasi SKPD	12 laporan	287.638.800	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	762.357.373	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	762.357.373	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.482.401.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.482.401.000	
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	14.999.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	14.999.400	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml.laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12 laporan	5.000.000	
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12 laporan	2.462.401.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	12 laporan	2.462.401.600	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 unit	186.482.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 unit	186.482.000	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	107.817.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	10 unit	107.817.200	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	12 unit	15.679.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	12 unit	15.679.200	
16	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 unit	62.985.600	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	Jml. gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	1 unit	62.985.600	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	76%	166.386.800	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	76%	166.386.800	
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	11%				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	11%		
			Persentase Perekaman KTP-el	100%				Persentase Perekaman KTP-el	100%		
			Persentase kepemilikan KK Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%				Persentase kepemilikan KK Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%		
			Persentase kepemilikan KTP Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%				Persentase kepemilikan KTP Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%		
			Persentase Kepemilikan KIA Anak Pekerja Migran bagi yang melaporkan	100%				Persentase Kepemilikan KIA Anak Pekerja Migran bagi yang melaporkan	100%		
			Persentase Perekaman KTP-el Keluarga Miskin bagi yang melaporkan	100%				Persentase Perekaman KTP-el Keluarga Miskin bagi yang melaporkan	100%		
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.470 dokumen	90.768.800	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	200.470 dokumen	90.768.800	
17	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	470 dokumen	10.628.800	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	470 dokumen	10.628.800	
18	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	200.000 dokumen	80.140.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml. Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	200.000 dokumen	80.140.000	
8	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2 laporan	75.618.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2 laporan	75.618.000	
19	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan	64.220.000	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 laporan	64.220.000	
20	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	1 laporan	11.398.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	1 laporan	11.398.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	57.960.800	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	57.960.800	
			Persentase Akta Perkawinan yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%				Persentase Akta Perkawinan yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
			Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%				Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
			Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%				Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%		
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran keluarga miskin bagi yang Melaporkan	100%				Persentase Penerbitan Akta Kelahiran keluarga miskin bagi yang Melaporkan	100%		
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%				Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang melaporkan	100%		
9	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	42.000 dokumen	36.840.800	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	42.000 dokumen	36.840.800	
21	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	42.000 dokumen	15.862.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	42.000 dokumen	15.862.000	
22	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	5 layanan	20.978.800	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jml.layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	5 layanan	20.978.800	
10	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Laporan	21.120.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Laporan	21.120.000	
23	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 laporan	5.720.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 laporan	5.720.000	
24	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	15.400.000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab.Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pencatatan Sipil	1 laporan	15.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	292.139.400	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	292.139.400	
			Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO	100%				Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO	100%		
11	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 persen	134.262.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 persen	134.262.000	
25	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	120 dokumen	10.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	120 dokumen	10.000.000	
26	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	437 dokumen	18.060.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	437 dokumen	18.060.000	
27	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	2 laporan	106.202.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	2 laporan	106.202.000	
12	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	44.289.600	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	44.289.600	
28	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	44.289.600	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	44.289.600	
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	113.587.800	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	113.587.800	
29	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	90.187.800	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 laporan	90.187.800	
30	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	23.400.000	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 laporan	23.400.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	74.319.600	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	74.319.600	
			Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode	18%				Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode	18%		
14	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	2 dokumen	74.319.600	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	2 dokumen	74.319.600	
31	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Data kependudukan Kabupaten Gresik	36.180 dokumen	69.048.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml. Data kependudukan Kabupaten Gresik	36.180 dokumen	69.048.000	
32	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain yg tersusun	2 dokumen	5.271.600	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab.Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	Jml.dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain yg tersusun	2 dokumen	5.271.600	
	JUMLAH BELANJA				13.224.384.021	JUMLAH BELANJA				13.224.384.021	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan sasaran dan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam Rancangan Renja OPD.

Dalam rangka penyusunan Awal Renja Tahun 2026 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada acara Forum OPD Tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mendapat masukan berupa peningkatan kinerja pelayanan. Disamping itu ada apresiasi terhadap kegiatan pelayanan yang selama ini telah dilakukan Dinas (seperti: tempat pelayanan yang lebih representatif, pelayanan yang mudah, cepat dan mudah diakses).

Tabel 2.4 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Gresik

Nama PD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Tahun 2026 jumlah penduduk sebanyak 1.375.332 juta. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan adalah merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dilaksanakan secara lebih baik dan tepat sasaran.

Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Urusan Kependudukan.

Kebijakan dan Strategi Nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, antara lain melalui :

a) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang tersebar merata dan pemerataan akses, yang mencakup :

1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, yang meliputi :

- Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh Kantor Perwakilan Republik Indonesia;
- Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;

- Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Teknologi Informasi (IT) dan terhubung lintas sektor, dan;
 - Keterhubungan antar sistem informasi diberbagai lembaga pemerintah.
 - Memperkuat sistem digital dan integrasi data kependudukan, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar mendukung transformasi digital.
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang mencakup :
- Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi;
 - Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI diluar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus terutama bagi keluarga miskin dan pekerja migran.
- b) Peningkatan validitas, integritas dan pemanfaatan data kependudukan, yang mencakup :
1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang mencakup :
- Pemanfatan administrasi kependudukan dan statistik hayati (seperti akta kelahiran, akta kematian,

perkawinan/perceraian) yang akurat agar dapat digunakan lintas sektor;

- Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.

2. Penguatan koordinasi, kolaborasi dan sinkronisasi antar-kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup :

- Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyeluruh dan selaras antar sektor;
- Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

c) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, yang mencakup :

1. Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten/kota dalam bidang pengendalian penduduk;
3. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga miskin dan pekerja migran.

2. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, Kemendagri RI pada Tahun 2018 mengeluarkan Instruksi Mendagri RI Nomor : 470/837/SJ

tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), tanggal 7 Pebruari 2018, yang terdiri dari 4 Pilar Utama yang harus dipedomani dalam mengambil langkah untuk melaksanakan GISA, yaitu :

- a. Sadar kepemilikan dokumen kependudukan (masyarakat harus memiliki seluruh dokumen kependudukan yang sah dan lengkap);
- b. Sadar pemutakhiran data kependudukan (masyarakat harus nproaktif memperbaharui data bila terjadi perubahan);
- c. Sadar pemanfaatan data kependudukan (instansi Pemerintah dan swasta memanfaatkan data dari Ditjen Dukcapil untuk Pelayanan Publik);
- d. Sadar Menuju Masyarakat yang Bahagia (aparatur Pemerintah harus memberikan layanan adminduk yang cepat, ramah, tanpa diskriminasi dan bebas biaya).

Disebutkan bahwa Bupati berkewajiban melaksanakan 4 program tersebut dalam skala kabupaten, dengan menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas terwujudnya GISA dalam skala kabupaten, serta mewujudkan paling sedikit 1 desa/kelurahan dalam 1 kecamatan sebagai Desa/ Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu

Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah menetapkan rumusan “Tujuan” jangka menengah yang ingin dicapai, sebagaimana dirumuskan di Renstra Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, ada 4 Tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif,
dengan indikator : Indeks Perlindungan Anak
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit,
dengan indikator: Indeks Pemerintahan Digital
3. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan,
dengan indikator: Indeks Kemiskinan Multidimensi
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal,
dengan indikator: Rasio penyerapan tenaga kerja lokal

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik adalah:

“Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Adaptif, Inklusif berbasis Digital untuk Pemenuhan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting”.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu

kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan hak sipil, dengan indikator kinerja adalah Pertumbuhan kepemilikan KIA
2. Meningkatkan manajemen pelayanan, dengan indikator kinerja adalah Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima, dengan indikator kinerja adalah:
 1. Persentase kepemilikan e-KTP,
 2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran,
 3. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
4. Meningkatkan kapabilitas keluarga miskin terhadap layanan administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja adalah:
 1. Persentase kepemilikan e-KTP untuk keluarga miskin,
 2. Persentase kepemilikan akta kelahiran untuk keluarga miskin.
5. Memperluas kesempatan kerja, dengan indikator kinerja adalah Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk.

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud ditetapkan strategi sebagai rencana tindak yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran sebagai salah satu upaya pemenuhan hak anak;
2. Meningkatkan validitas data dokumen kependudukan sesuai kondisi terkini;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pemenuhan dokumen kependudukan bagi keluarga miskin;
5. Pemenuhan dokumen kependudukan bagi penduduk migran.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan sesuai RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, Review terhadap RKPD Tahun 2026 serta telaah terhadap Kebijakan Nasional, maka pada tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun program dan kegiatan serta sub-kegiatan, meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 32 Sub-kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp. 13.224.384.021,00. Formulasi Program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026 serta kebutuhan dana/ pagu indikatif sebagaimana *Tabel 2.7 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju tahun 2027 (T-C.33)*

TABEL 2.7 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN GRESIK

NAMA OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				13.224.384.021				12.654.876.092
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian sasaran program OPD		100 persen	12.633.577.421			100 persen	11.932.518.239
1	2.12.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 dokumen	33.493.600			10 dokumen	40.978.960
1	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	6 dokumen	27.052.800	APBD		6 dokumen	33.894.080
2	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml. Laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	4 laporan	6.440.800	APBD		4 laporan	7.084.880
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13 dokumen	6.546.798.914			13 dokumen	6.547.378.914
3	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	62 org/bln	6.540.998.914	APBD		62 org/bln	6.540.998.914
4	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml.Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab.Gresik, Gresik, Bedilan	13 laporan	5.800.000	APBD		13 laporan	6.380.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	248.550.000			100%	61.907.177
5	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jml.Orang yg mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	580 orang	248.550.000,00	APBD		486 orang	61.907.177,00
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	3.135.851.907			100 persen	2.377.467.948
6	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml.paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	9 paket	2.007.202.287	APBD		9 paket	1.417.465.181
7	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml.paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	2 paket	38.778.400	APBD		2 paket	42.656.240
8	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	1 paket	39.875.047	APBD		1 paket	43.862.552
9	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml.laporan penyelenggaraan rpt koord Dan konsultasi SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	12 laporan	287.638.800	APBD		12 laporan	784.905.000
10	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	1 Dokumen	762.357.373	APBD		1 Dokumen	88.568.975
5	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	2.482.401.000			100 persen	2.595.380.420
11	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml.Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	12 laporan	14.999.400	APBD		12 laporan	16.499.340
12	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jml.laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	12 laporan	5.000.000	APBD		12 laporan	67.019.480
13	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jml. Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	12 laporan	2.462.401.600	APBD		12 laporan	2.511.861.600
6	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23 unit	186.482.000			23 unit	309.414.820

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml. kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan Pajak dan penjinannya	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	10 unit	107.817.200	APBD		10 unit	131.264.540
15	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jml. peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	12 unit	15.679.200	APBD		12 unit	98.999.120
16	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml. gedung kantor atau bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Kab. Gresik, Gresik, Bedilan	1 unit	62.985.600	APBD		1 unit	79.151.160
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		78%	166.386.800			78%	262.983.973
			Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		11%				11%	
			Persentase Perekaman KTP-el		100%				100%	
			Persentase kepemilikan KK Pekerja migran bagi yang melaporkan		100%				100%	
			Persentase kepemilikan KTP Pekerja migran bagi yang melaporkan		100%				100%	
			Persentase Kepemilikan KIA Anak Pekerja Migran bagi yang melaporkan		100%				100%	
			Persentase Perekaman KTP-el Keluarga Miskin bagi yang melaporkan		100%				100%	
7	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk		200.470 dokumen	90.768.800			201.500 dokumen	170.983.973
17	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jml. dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	470 dokumen	10.628.800	APBD		500 dokumen	11.583.000
18	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jml. Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	200.000 dokumen	80.140.000	APBD		201.000 dokumen	159.400.973
8	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		2 laporan	75.618.000			2 laporan	82.000.000
19	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	1 laporan	64.220.000	APBD		1 laporan	70.000.000
20	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	1 laporan	11.398.000	APBD		1 laporan	12.000.000
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%	57.960.800			100%	93.766.880
			Persentase Akta Perkawinan yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%				100%	
			Persentase Akta Perceraian Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%				100%	
			Persentase Akta Kelahiran yg Diterbitkan bagi yang Melaporkan		100%				100%	
			Persentase Penerbitan Akta Kelahiran keluarga miskin bagi yang Melaporkan		100%				100%	
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Pekerja migran bagi yang melaporkan		100%				100%	
9	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil		42.000 dokumen	36.840.800			42.000 dokumen	63.756.880
21	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jml. dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	42.000 dokumen	15.862.000	APBD		43.000 dokumen	34.388.200
22	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jml. layanan pencatatan sipil yg ditingkatkan	Kab. Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	5 layanan	20.978.800	APBD		5 layanan	29.368.680

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		2 Laporan	21.120.000			2 Laporan	30.000.000
23	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	1 laporan	5.720.000	APBD		1 laporan	10.000.000
24	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab Gresik, seluruh kec dan kelurahan, desa	1 laporan	15.400.000	APBD		1 laporan	20.000.000
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		100%	292.139.400			100%	293.865.440
			Persentase layanan Adminduk berstandarisasi ISO		100%				100%	
11	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100 persen	134.262.000			100 persen	120.200.300
25	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jml.dokumen data kependudukan yg diolah dan disajikan	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	120 dokumen	10.000.000	APBD		120 dokumen	11.000.000
26	2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jml. Dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	437 dokumen	18.060.000	APBD		438 dokumen	19.877.000
27	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jml.laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	2 laporan	106.202.000	APBD		2 laporan	89.323.300
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		12 Laporan	44.289.600			12 Laporan	48.718.560
28	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml.laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	12 laporan	44.289.600	APBD		12 laporan	48.718.560
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		4 Laporan	113.587.800			4 Laporan	124.946.580
29	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	2 laporan	90.187.800	APBD		2 laporan	99.206.580
30	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	2 laporan	23.400.000	APBD		2 laporan	25.740.000
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		100%	74.319.600			100%	81.751.560
			Cakupan akumulatif sisa KK belum ber-barcode		18%				18%	
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan		2 dokumen	74.319.600			2 dokumen	81.751.560
31	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jml. Data kependudukan Kabupaten Gresik	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	36.180 dokumen	69.048.000	APBD		28.944 dokumen	75.952.800
32	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jml.dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yg lain yg tersusun	Kab Gresik, seluruh kec., kelurahan, desa	2 dokumen	5.271.600			2 dokumen	5.798.760
		JUMLAH BELANJA				13.224.384.021				12.854.876.092



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026 mencermati kinerja program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator kinerja. Selanjutnya dilakukan pencermatan atas target capaian kinerja yang harus direalisasikan. Terkait dengan hal tersebut pada setiap kegiatan dan sub-kegiatan diawali dengan penyusunan jadwal, penggunaan sumber daya (Sarana, SDM dan Keuangan). Pada setiap bulan kegiatan dan sub-kegiatan berdasarkan tahapan pelaksanaannya, perlu dibuat laporan capaian yang secara keseluruhan menjadi laporan kemajuan capaian kinerja sebagai media laporan di tingkat Kabupaten.

4.2 Pendanaan

Pendanaan atas program, kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026 sesuai dengan pagu indikatif perlu direncanakan penggunaannya sejalan dengan perencanaan atas pelaksanaan fisik kegiatan dan sub-kegiatan. Pendanaan atas seluruh kegiatan dan sub-kegiatan tahun 2026 secara riil adalah yang tertuang dalam Perda tentang ABPD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2026 yang diikuti dengan penyusunan Dokumen Pelaksaaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Sebagaimana disebutkan bahwa pagu indikatif tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.224.384.021,00

4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 32 Sub-

kegiatan,dengan anggaran sebesar Rp. 13.224.384.021,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi 2 sub-kegiatan
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi 2 sub-kegiatan
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi 1 Sub-kegiatan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi 5 sub-kegiatan
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, meliputi 3 sub-kegiatan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, meliputi 3 sub-kegiatan
2. Program Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi 2 sub-kegiatan
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, meliputi 2 sub-kegiatan
3. Program Pencatatan Sipil, terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi 2 sub-kegiatan
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, meliputi 2 sub-kegiatan
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data kependudukan, meliputi 3 sub-kegiatan
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan, meliputi 1 sub-kegiatan
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi 2 sub-kegiatan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan, meliputi 2 sub-kegiatan

Rencana kerja dan pendanaan RKPD tahun 2026 berdasarkan SIPD sebagaimana *Tabel 2.8 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.*

**TABEL 2.8 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. GRESIK
TAHUN 2026**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	27.052.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif eGRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		33.894.080,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6.440.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif @GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		7.084.880,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan OPD	-			13 Dokumen	6.546.798.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif @GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	6.547.378.914,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				13 Laporan	5 800 000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kev/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempo rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		6 380 000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya pengelolaan administrasi pegawai</i>	-			100 Person	248 550 000,00			Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	JATIM BER KAH-AMAN AH Mempo rkuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-	-	61.907 177,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				580 Orang	248.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		61.907.177,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	287.638.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMAN AH Mampu kuat Peny elenggara n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan			784.905.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	762.357.373,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		88.568.975,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan kantor	-			100 Person	2.482.401.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA AH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	2.595.380.420,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANKAH! Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Sehat, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Pengustatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik, Inklusif dan Responsif Gendat serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan			87.019.480,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.462.401.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Bertbasis Satu Data Pembangunan	-		2.511.861.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</i>	-			23 Unit	186.482.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Bertbasis Satu Data Pembangunan	-	-	309.414.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	107.817.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANKAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		131.264.540,00	DINAS KEPENGOUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Ditahabibasi				1 Unit	62.985.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		79.151.160,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KIA Persentase perekaman KTP-el	-			64,74 Persen 99,39 Persen	168.386.600,00						-	262.983.973,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Persentase kepemilikan KIA anak pekerja migran bagi yang melaporkan Persentase kepemilikan KK pekerja migran bagi yang melaporkan Persentase kepemilikan KTP pekerja migran bagi yang melaporkan Persentase perekaman e-KTP Persentase perekaman e-KTP keluarga miskin bagi yang melaporkan	100 15 80	100 75,49 9,07	10 100 75	100 11 75	168.386.600,00	-	-	-	-	-	-	262.983.973,00	-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				200.000 Dokumen	80.140.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANA Mempertuak Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		159.400.973,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	75.618.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANA Mempertuak Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	82.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																
			0				10	64.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KevDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kota Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0003 Fasilitas Pendaftaran Penduduk																

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	20.978.800,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		29.368.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	21.120.000,00			-	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	18.060.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKHA-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Pengustan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan			19.877.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2 12 04 2 01 0003		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	106.202.000,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua KeV/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		89.323.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Terpenuhinya data kependudukan terkini</i>	-			100 Porsi	44.289.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	48.718.560,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	44.289.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan	JATIM BERKAH-AMANA Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif @GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		48.716.560,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	90.187.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	JATIM BER KAH-AMAN AH! Memp kuat Peny elenggaraa n Tata Kelola Pem erintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayana n Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Suhu Data Pembangu nan	-	99.208.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.12.04.2.04.0003		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perekembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Esas yang tersusun				1 Dokumen	5.271.600,00	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	JATIM BERKAH-AMANA H Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif #GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		5.798.760,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
JUMLAH								13.224.384.021,00							12.654.876.092,00	



BAB V

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Renja PD ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025 sampai dengan triwulan III. Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
2. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2026.

Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : Oktober 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK



Drs. MUHAMMAD HARI SYAWALUDIN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 198809 1 001

The background of the page is a light blue gradient with abstract, wavy, layered shapes in various shades of blue, creating a sense of depth and movement. A thin, vertical blue line runs down the center of the page.

LAMPIRAN



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/1365 /HK/437.12/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien dan bersasaran diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 1365 /HK/437.12/2024

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026.
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2026; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2026 kepada Ketua Tim; dan d. melaksanakan Analisis kebijakan Kinerja seluruh Pelayanan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Farihatun Ni'mah, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan fasilitasi, pembinaan umum dan koordinasi, perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk; b) melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) melaksanakan fasilitasi penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk; dan d) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Sunarsih Widiana, Pengadministrasi akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 2) Agus Junaidi, Pengadministrasi akta kelahiran dan kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan perencanaan fasilitasi, pembinaan dan koordinasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; b) melaksanakan kebijakan teknis, bimtek, supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			c) melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pencatatan sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian perubahan status anak, kewarganegaraan; d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil di Kabupaten; dan e) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Gresik. 1) Thomas Rudy Wibowo, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi penyusunan program sebagai bahan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sisten informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Tatang Surya Laksmiana, S.Kom., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	b) melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi; c) melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola TI dan komunikasi SDM teknologi dan informasi; d) melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan e) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabupaten Gresik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Elly Erninawati, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan 2) Dimas Tri Wicaksono, S.Kom., Analisis Sistem Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan perencanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; c) melaksanakan kebijaksanaan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; d) melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melaksanakan kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Siti Masitoh, S.E., M.M., Perencana Ahli Muda Sekretariat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. 1) Nur Umi Hartanti, S.E., M.M., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik; dan 2) Dany Budiarto, S.E., M.M., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

